



PPAS

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN 2024

**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka rencana pembangunan yang akan dianggarkan dalam APBD terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disusun dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024. RKPD Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024 disusun melalui beberapa pendekatan perencanaan yaitu teknokratis, partisipatif, politis, atas bawah dan bawah-atas (top- down/bottom up) melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Parigi Moutong. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan,

Penyusun dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) melalui tahapan :(1) menentukan skala prioritas pembangunan daerah;(2) menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan yang disinkronisasikan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024; serta (3) menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan.

Melalui tahapan yang telah diuraikan di atas, dokumen PPAS Kabupaten Parigi Moutong memuat rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada OPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD) Tahun Anggaran 2024. Substansi dokumen PPAS dimaksud meliputi urutan prioritas program dan kegiatan serta sasaran dan target kinerja masing-masing program dan kegiatan yang didasarkan pada KUA dan plafon anggaran sementara menurut urusan pemerintahan, organisasi serta berdasarkan pengelompokan belanja operasi dan belanja modal.

1.2. Tujuan Penyusunan PPAS

Tujuan penyusunan PPAS Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2024 adalah meningkatkan keterkaitan antara kebijakan perencanaan pembangunan dan penganggaran sehingga dapat dijadikan acuan dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2024 sehingga bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Parigi Moutong.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan PPAS

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Rancangan PPAS Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang

RPJP Daerah dan RPJM Daerah serta Perubahan RPJP Daerah, RPJM Daerah dan RKP Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Parigi Moutong tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2010-2030;
13. Peraturan Bupati Parigi Moutong Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.

BAB II
RENCANA PENDAPATAN, BELANJA
DAN PEMBIAYAAN DAERAH

Target pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah (PAD), penerimaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, serta sumber-sumber penerimaan pembiayaan berdasarkan kebijakan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dalam KUA Kabupaten Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2024 adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.1
Proyeksi Pendapatan Kabupaten Parigi Moutong
Tahun 2023 - 2024

Kode Rekening	Uraian	APBD 2023	Proyeksi 2024	Selisih
1	2	3	4	5=4-3
4	Pendapatan Daerah	1.704.063.802.731,75	1.271.298.682.226,09	(432,765,120,505.00)
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	142.315.008.285,00	158.289.176.957,00	15,974,168,672.00
4.1.1.	Hasil Pajak Daerah	16.102.000.000,00	19.552.500.000,00	3,450,500,000.00
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	9.070.910.460,00	10.650.806.470,00	1,579,896,010.00
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.067.381.987,00	5.067.381.987,00	-
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	112.074.715.838,00	123.018.488.500,00	10,943,772,662.00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.558.728.894.446,75	1.113.009.505.269,09	(445,719,389,177.00)
4.2.1	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	1.504.859.678.000,00	1.056.446.828.000,00	(448,412,850,000.00)
4.2.2	TRANSFER ANTAR DAERAH	53.869.216.446,75	56.562.677.269,09	2,693,460,823.00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	3.019.900.000,00		3.019.900.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.704.063.802.731,75	1.271.298.682.226,09	(432,765,120,505.00)

Tabel di atas menunjukkan bahwa Total Pendapatan Daerah tahun 2024 diperkirakan sebesar Rp.1.271.298.682.226,09 mengalami penurunan 25,40% dari tahun 2023 sebesar Rp.432.765.120.505,00.

Penurunan tersebut terjadi dikarenakan tidak tercapainya target pendapatan daerah serta penurunan pendapatan dari Transfer Dana Perimbangan pada DAU dan DAK.

Tabel 2.2
Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Parigi Moutong
Tahun 2023 - 2024

Kode Rekening	Uraian	APBD 2023	Proyeksi 2024	Selisih
1	2	3	4	5=4-3
5.	JUMLAH BELANJA	1,732,337,414,188.00	1,270,298,682,227.00	(462,038,731,961.00)
5.1.	BELANJA OPERASI	1,201,780,034,868.00	842,803,438,792.00	(358,976,596,076.00)
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	620,118,763,661.00	561,142,167,585.00	(58,976,596,076.00)
5.1.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	499,756,632,229.00	199,756,632,229.00	(300,000,000,000.00)
5.1.3.	BELANJA BUNGA	600.000.000,00	600.000.000,00	-
5.1.5.	BELANJA HIBAH	78,336,261,978.00	78,336,261,978.00	-
5.1.6.	BELANJA BANTUAN SOSIAL	2,968,377,000.00	2,968,377,000.00	-
5.2.	BELANJA MODAL	217,922,429,553.00	88,302,512,788.00	(129,619,916,765.00)
5.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	10,000,000,000.00	20,000,000,000.00	10,000,000,000.00
5.4.	BELANJA TRANSFER	302,634,949,767.00	319,192,730,647.00	16,557,780,880.00
	JUMLAH BELANJA	1,732,337,414,188.00	1,270,298,682,227.00	(462,038,731,961.00)

Proyeksi Belanja Daerah pada Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 26,67% atau sebesar Rp.462.038.731.961,- dari APBD Tahun 2023.

Tabel 2.4
Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Parigi Moutong
Tahun 2023 - 2024

Kode Rekening	Uraian	APBD 2023	Proyeksi 2024	Selisih
1	2	3	4	5=4-3
6	PEMBIAYAAN DAERAH	28,273,611,456.00	(1,000,000,000.00)	(29,273,611,456.00)
6.1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	34,273,611,456.00	-	(34,273,611,456.00)
6.1.1.	SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya	34,273,611,456.00	-	(34,273,611,456.00)

6.2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	6,000,000,000.00	1,000,000,000.00	(5,000,000,000.00)
6.2.1.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-
6.2.1.01.	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Pemerintah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-
6.2.1.01.01	Penerusan Pinjaman dari pemerintah Pusat (IBRD)	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	
	Penyertaan Modal PT. Bank Sulteng	5.000.000.000,00		5.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	28,273,611,456.00	(1,000,000,000.00)	(29,273,611,456.00)

BAB III

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat kemendesakan dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Prioritas pembangunan juga dapat dikategorikan sebagai operasional dari tujuan strategis daerah berdasarkan pada urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunan secara keseluruhan, dan untuk menjaga konsistensi perencanaan pembangunan maka sasaran dan prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Parigi Moutong tahun 2024 yang berpedoman pada RPD Kabupaten Parigi Moutong tahun 2024-2026, RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026. Perencanaan pembangunan tahun 2024 ini merupakan tahun pertama dari Rencana Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 08 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024-2026.

Perencanaan Tahun 2024 dirumuskan berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024-2026, hasil evaluasi RKPD tahun 2022 dan capaian kinerja Perubahan RPJMD tahun 2022, identifikasi isu strategis, serta permasalahan-permasalahan yang mendesak. Pada tahap kelima ini upaya peningkatan keunggulan kompetitif Kabupaten Parigi Moutong dalam bidang pertanian dan pariwisata perlu ditingkatkan untuk mencapai kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Parigi Moutong yang lebih baik, sehingga dapat meningkatkan kontribusi Kabupaten Parigi Moutong terhadap pencapaian pembangunan menyeluruh baik provinsi maupun nasional, dengan fokus pembangunan lebih diorientasikan dalam mewujudkan Kabupaten Parigi Moutong keluar dari status sebagai daerah kantong kemiskinan di provinsi Sulawesi Tengah.

3.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan pembangunan daerah adalah penjabaran atau implementasi rencana pembangunan pada jangka waktu tertentu, dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis daerah. Dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan diperlukan adanya kerangka yang jelas, menyangkut tujuan dan sasaran yang hendak di

capai, tujuan dan sasaran yang akan dijalankan, akan memberikan arah bagi pelaksanaan urusan pemerintahan yang baik urusan terkait aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum maupun aspek daya saing daerah. Perumusan tujuan dan sasaran beserta indikatornya adalah tahapan strategis yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Sesuai arahan RPJPN Tahun 2005–2025, sasaran pembangunan jangka menengah tahun 2020–2024 adalah "mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing." Dalam mewujudkan sasaran tersebut, diperlukan upaya yang optimal, peningkatan sinergi pemerintah pusat dan daerah serta penguatan kolaborasi pemerintah dengan seluruh pemangku kepentingan pembangunan. Sasaran pembangunan nasional tahun 2024, yaitu:

1. Mengembalikan momentum pertumbuhan melalui peningkatan produktivitas dengan indikator (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat pengangguran terbuka, dan (c) rasio gini
2. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai representasi pembangunan inklusif dengan indikator (a) indeks pembangunan manusia, dan (b) tingkat kemiskinan.

Sasaran makro pembangunan Nasional sebagaimana tertuang dalam rancangan Rencana Kerja Pemerintah yang akan dicapai pada akhir tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3% – 5,7%
2. Indeks Pembangunan Manusia 73,99 -74,02
3. Tingkat kemiskinan menurun menjadi sebesar 6,5% – 7,5%
4. Tingkat pengangguran menjadi sebesar 5,0% – 5,7%
5. Rasio Gini 0,374 -0,377

Selanjutnya sasaran pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah yang akan dicapai pada akhir tahun 2024 adalah;

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 13,70 – 15,30
2. Indeks Pembangunan Manusia 71,27 – 71,39
3. Tingkat kemiskinan 10,30% - 12,26%
4. Tingkat Pengangguran terbuka 2,61 – 2,84%
5. Rasio Gini 0,302 – 0,303

Adapun rumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang hendak dicapai pada tahun 2024 yang disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024 - 2026 disajikan pada tabel 3.I di bawah ini:

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran RKPD Tahun 2024 Menurut Visi, Misi

No	TUJUAN		SASARAN		Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2024
	URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR			
1	Tata kelola birokrasi yang efektif, efisien, dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	Kinerja pemerintahan yang berorientasi hasil dan akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Poin	42,34	43
			Kinerja pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien	Opini BPK terhadap Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Opini	WTP	WTP
12,5 0= 54	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	1 Kualitas Pengelolaan Pendidikan yang berdaya saing	Harapan Lama Sekolah	Poin	64,53	68,09
			2 Kualitas Kesehatan yang berdaya saing	Rata rata lama sekolah	Tahun	12,50	12,54
			3 Menurunnya Jumlah Penduduk Miskin	Usia Harapan Hidup Prevalensi Stunting Angka kemiskinan	Tahun Persen Persen	7,77 64,35 27,4	7,87 65 23,35
3	Meningkatkan nilai tambah produk pertanian dan perikanan.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	1 Meningkatkan produksi pertanian, Perikanan dan Kehutanan	PDRB Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	Persen	4,72	4,88
			3 Meningkatkan pengolahan hasil komoditi unggulan	Berlaku Kosntan	Rupiah (Juta)	1.833.582	9.456.366
			3 Meningkatkan investasi daerah	Berlaku Kosntan	Rupiah (Juta)	5.190.589	57.47.094
4	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	1 Meningkatkan kualitas air, udara dan tutupan lahan	PDRB Pengolahan	Rupiah (Juta)	456.642	520.256
				PDRB Pengolahan	Rupiah (Juta)	275.051	302.453
				Peringkat realisasi investasi	Rupiah	123.732.228,049	186.352.848,144
			Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks Kualitas Air (IKA)	Poin	74,32	79,55
			Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Poin	50,00	65,50
			Indeks Tutupan Lahan	Indeks Tutupan Lahan	Poin	97,55	94,76
					Poin	73,11	78,69

No	TUJUAN		SASARAN		Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2024
	URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR			
			2	Menurunkan Resiko Bencana	Indeks Resiko Bencana (IRB)	108,39	108,39
						81	80
5	Meningkatkan pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya	Ketaatan terhadap RTRW	1	Meningkatkan ruang terbuka hijau	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota kawasan perkotaan	18	18,5

3.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan

Prioritas dan sasaran pembangunan merupakan penetapan target atau hasil yang diharapkan dari program dan kegiatan selama periode tertentu. Prioritas dan sasaran pembangunan Parigi Moutong Tahun 2024 adalah penjabaran Rencana Pembangunan Daerah 2024 - 2026 yang merupakan satu kesatuan perencanaan yang tidak dapat dipisahkan.

Berdasarkan perkembangan kondisi tahun 2022 ini fokus pembangunan diarahkan pada percepatan pembangunan di semua bidang, dengan sebagian besar modal pembangunan berasal dari kekuatan sendiri. Keterkaitan prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.2 di bawah ini

Tabel 3.2.

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2023

No	PRIORITAS	SASARAN			Sasaran	TARGET
		URAIAN	INDIKATOR	Satuan		
1	Reformasi Birokrasi	-	Kinerja pemerintahan yang berorientasi hasil dan akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai	73
		-	Kinerja pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien	Opini BPK terhadap Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Opini	WTP
2	Meningkatkan kualitas sumbu daya manusia yang berdaya saing	-	Kualitas Pengelolaan Pendidikan yang berdaya saing	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,54
		-	Kualitas Kesehatan yang berdaya saing	Rata rata lama sekolah	Tahun	7,87
		-	Kualitas Kesehatan yang berdaya saing	Usia Harapan Hidup	Tahun	65
		-	Kualitas Kesehatan yang berdaya saing	Prevalensi Stunting	Persen	23,35
3	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif	-	Menurunnya Jumlah Penduduk Miskin	Angka kemiskinan	Persen	14,28
		-	Meningkatnya produksi pertanian, Perikanan dan Kehutanan	PDRB Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	Rupiah (juta)	9.456.366
		-	Meningkatnya pengolahan hasil komoditi unggulan	Kosntan		5.747.094
		-	Meningkatnya investasi daerah	PDRB Pengolahan	Rupiah (juta)	520.256
		-	Meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan	Peningkt/realisasi investasi	Rupiah (juta)	186.352.848,144
4	Pelestarian lingkungan yang berkelanjutan	-	Indeks Kualitas Air (IKA)	Poin		65,50

No	PRIORITAS	SASARAN			Satuan	TARGET
		URAIAN	INDIKATOR			
			Indeks Kualitas Udara (IKU)		Poin	94,76
			Indeks Tutupan Lahan		Opini	78,69
-	Menurunnya Resiko Bencana		Indeks Resiko Bencana (IRB)			108,39
-	Meningkatnya ruang terbuka hijau		Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan		Persen	18,5

3.2.1 Isu Strategis Pembangunan Daerah

Berdasarkan permasalahan utama pembangunan daerah seperti yang diuraikan pada Bab II, isu strategis pembangunan nasional dalam RPJMN, isu strategis pembangunan Provinsi serta pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta memperhatikan analisis terhadap Permasalahan Pembangunan Daerah serta kajian terhadap kebijakan pembangunan di daerah sekitar Kabupaten Parigi Moutong serta isu-isu strategis internasional, nasional serta regional dan aspek lainnya, maka isu strategis pembangunan Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024 berdasarkan hasil analisis tersebut isu strategis yang mendapatkan perhatian serius dan fokus pada 8 (delapan) hal dari pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi Reformasi birokrasi
2. Peningkatan Usia Harapan Hidup (UHH)
3. Peningkatan rata-rata lama sekolah
4. Kontribusi PDRB dari sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan
5. Peningkatan laju pertumbuhan sektor industri pengolahan
6. Menurunkan angka pengangguran
7. Penanggulangan Kemiskinan
8. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

3.2.1.1 Optimalisasi Reformasi Birokrasi

Menggerakkan reformasi birokrasi melalui institusi Pemerintahan daerah Kabupaten Parigi Moutong yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Pemda Kabupaten Parigi Moutong adalah subjek reformasi birokrasi. Oleh sebab itu, saat ini setiap perangkat daerah diwajibkan melakukan penilaian mandiri atas prakarsa dan praktik reformasi birokrasi yang sudah, sedang, dan akan mereka lakukan. Langkah strategis ini diharapkan dapat menopang kesuksesan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya pada Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong di masa yang akan datang. Langkah menjalankan reformasi birokrasi tentu bukan perkara mudah

harus menjadi komitmen semua pihak. Reformasi birokrasi hanya terjadi bila adanya dua hal yaitu pertama ada konsistensi: teguh, selalu memikirkan kelanjutan dan berkarakter. Kedua, konsekuen: cakap dalam tugas, sederhana, dan dapat diandalkan ketika melakukan banyak hal. Pelayanan publik atau pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah masih dinilai kurang dapat memenuhi tugasnya sesuai dengan harapan masyarakat dan salah satu yang menjadi penyebabnya adalah birokrat dan bentuk birokrasinya yang berbelit-belit sehingga diperlukan langkah konkret di dalam memperbaiki kinerja birokrasi. Hal itu terlihat dari masih adanya keluhan dan pengaduan masyarakat baik itu disampaikan secara langsung maupun melalui media massa atau bahkan media sosial. Oleh karena itu, diperlukan komitmen dan langkah strategis yang terpadu dan berbasis teknologi guna menjawab permasalahan dan tantangan di masa mendatang. Dengan pelimpahan wewenang dan penerapan Standar Pelayanan minimal (SPM) pada Perangkat Daerah yang terkait pelayanan, sangat diharapkan agar penyelenggaraan pelayanan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta membuka peluang bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan investasi dan melakukan inovasi serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Untuk itu, budaya transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan menjadi isu utama di dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Parigi Moutong setidaknya didalam periode transisi Tahun 2024-2026. Pengembangan dan pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen sumberdaya manajemen dalam lingkungan birokrasi mesti difasilitasi secara komprehensif, simultan, dan berkesinambungan melalui mekanisme yang tepat dan efisien.

3.2.1.2 Peningkatan Usia Harapan Hidup (UHH)

Urusan kesehatan merupakan satu dari beberapa urusan wajib pelayanan dasar yang harus dipenuhi oleh Pemerintah. Kondisi kesehatan masyarakat menjadi satu dari berbagai tolok

ukur keberhasilan pembangunan di suatu daerah, mengingat urusan kesehatan menjadi salah satu komponen yang menunjang ketercapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) baik di level daerah maupun nasional.

Sementara indikator Kesehatan juga memiliki permasalahan atau isu strategis yang akan dibenahi di masa yang akan datang, yakni Usia Harapan Hidup (UHH) rendah yaitu 64,35 Tahun pada Tahun 2022, sehingga perlu upaya nyata peningkatan, Masih tingginya kasus kematian Ibu dan bayi, Angka prevalensi *Stunting* masih Tinggi berkisar 27,4 persen Tahun 2022, Angka prevalensi kurang gizi dan Gizi Buruk masih ditemukan, Rasio tenaga medis persatuan penduduk belum memadai serta Kesadaran akan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat masih rendah.

3.2.1.3 Peningkatan Rata-rata Lama Sekolah

Kualitas penduduk atau mutu sumber daya manusia (SDM) sangat berpengaruh terhadap tingkat kemajuan sebuah bangsa bahkan daerah. Pendidikan dan Kesehatan merupakan salah satu kunci utama untuk mencapai kemajuan suatu daerah. Cepat atau lambat suatu daerah dalam meningkatkan kemajuan ekonominya sangat tergantung pada keberhasilan daerah tersebut memberikan layanan pendidikan dan kesehatan

kepada penduduknya. Kondisi Pendidikan Kabupaten Parigi Moutong masih rendahnya di mana terdapat penduduk usia sekolah yang tidak/belum sekolah dan buta huruf, Sebagian besar Indikator Pendidikan masih berada di bawah rata-rata Provinsi, Program pendidikan wajar 9 tahun belum tuntas, yang ditunjukkan oleh Angka Harapan Lama Sekolah sebesar 12,50 tahun dan Rata-Rata Lama Sekolah sangat rendah sebesar 7,77 Tahun, Angka Buta huruf masih ada 1,25 persen, Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2022 yakni SD/MI

(105,73), SMP (91,16%); Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2022 yaitu SD/MI (98,35%), SMP/MTs (62,19%), Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2021 pada tingkat SD/MI (97,55%), SMP/MTs (90,78%).

Sebagaimana diketahui bahwa, semakin tinggi tingkat pendidikan penduduk, menunjukkan semakin tingginya kualitas penduduk di daerah tersebut. Pendidikan yang baik akan meningkatkan kemampuan penduduk untuk mengolah sumber daya alam yang dimiliki sehingga akan meningkatkan kesejahteraan penduduk.

3.2.1.4 Kontribusi PDRB dari sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan

Kabupaten Parigi Moutong merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi pada sektor pertanian. Beberapa keunggulan sektor pertanian adalah pada komoditas pertanian pangan, jagung hibrida, hortikultura sayuran dan buah-buahan. Sektor pertanian di Kabupaten Parigi Moutong merupakan penyumbang PDRB terbesar dengan kontribusi sebesar 15.28 persen pada Tahun 2021. Namun kontribusi tersebut harusnya bisa lebih ditingkatkan dengan melihat luasnya lahan pertanian yang ada di Kabupaten Parigi Moutong dan sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara Pemerintah daerah perlu berupaya meningkatkan target pendapatan atau kontribusi sektor pertanian dapat lebih tinggi dalam menyumbang PDRB di masa yang akan datang.

Pada sektor perikanan yakni ikan laut merupakan beberapa produk unggulan yang dimiliki oleh Kabupaten Parigi Moutong. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa perikanan dapat menjadi salah satu sektor yang berkontribusi besar terhadap perekonomian daerah.

Perkembangan luas lahan usaha perikanan darat khususnya yang dilakukan di kolam selama lima tahun terakhir

cenderung meningkat. Namun peningkatan luas lahan ini tidak mempengaruhi hasil produksi perikanan tangkap di Kabupaten Parigi Moutong. Luas lahan usaha perikanan darat khususnya kolam selama tiga tahun terakhir tidak mengalami perubahan ada pada angka 348 m², luas lahan perikanan tambak 10.058,35 m² mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dan luas lahan budidaya perikanan laut 49.000 m² tidak mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Dari penambahan luas lahan usaha perikanan tersebut tidak meningkatkan produksi perikanan karena dipengaruhi oleh beberapa hal seperti sarana dan prasarana, SDM, terbatasnya modal serta bantuan peralatan perikanan pada nelayan.

3.2.1.5 Peningkatan Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan

Perindustrian merupakan salah satu sektor yang menopang perekonomian Kabupaten Parigi Moutong menggapai pertumbuhan ekonomi berkualitas menjadi tantangan tersendiri bagi setiap daerah, pertumbuhan ekonomi suatu daerah pada dasarnya akan berkualitas, jika pertumbuhan ekonominya berkontribusi menekan berkurangnya jumlah penduduk miskin dan terjadinya pemerataan pendapatan. Sektor industri merupakan sektor kunci (key sector) dalam mendorong perkembangan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Sektor Industri di Kabupaten Parigi Moutong memberikan kontribusi terhadap perolehan PDRB Kabupaten Parigi Moutong dan memiliki peran penting sebagai penyanggah ekonomi masyarakat terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Parigi Moutong

Persentase kontribusi sektor Industri terhadap PDRB terlihat pada Tahun 2022, persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan ADH Berlaku mencapai 2,41 persen dan berdasarkan ADH Konstan mencapai 3,27 persen. Untuk itu arah kebijakan Pembangunan sektor industri pengolahan terutama IKM-UKM pengolahan

produk pertanian yang dipasarkan melalui berkembangnya pariwisata daerah baik alamnya maupun budayanya. Faktor lain yang mendukung sektor industri beberapa potensi yang ada di Kabupaten Parigi Moutong perlu mendapat sentuhan dari pemerintah agar dapat diolah oleh masyarakat dan meningkatkan kontribusi industri untuk PDRB, serta untuk penciptaan lapangan kerja dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

3.2.1.6 Menurunkan Angka Pengangguran

Pengangguran merupakan salah satu penyakit ekonomi yang sangat berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi. Pengangguran mengakibatkan orang tidak memiliki pendapatan dan mendorong mereka jatuh ke jurang kemiskinan. Secara umum pemerintah mengatasi pengangguran dengan mengupayakan memperluas kesempatan kerja, baik di sektor pemerintahan maupun sektor swasta. Masalah pengangguran selalu menjadi permasalahan yang sulit terpecahkan. Sebab jumlah penduduk yang bertambah semakin besar tiap tahunnya, akan menyebabkan meningkatnya jumlah orang pencari kerja, dan seiring itu tenaga kerja juga akan bertambah. Jika tenaga kerja tidak dapat terserap ke dalam lapangan pekerjaan maka mereka akan tergolong ke dalam orang yang menganggur.

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Parigi Moutong hingga Tahun 2022 sebesar 1,71 persen lebih rendah bila dibandingkan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka provinsi Sulawesi Tengah sebesar 3,00 persen.

3.2.1.7 Penanggulangan Kemiskinan

Dalam lima tahun terakhir persentase penduduk miskin di Kabupaten Parigi Moutong secara persentasi mengalami penurunan yakni Tahun 2018 sebesar 17,41 persen menjadi 14,63

persen pada Tahun 2022. Sedangkan untuk jumlah penduduk miskin juga mengalami penurunan kurun waktu 5 tahun meski tidak signifikan. Pada Tahun 2018 jumlah penduduk miskin sebesar 83.660 jiwa, dan Tahun 2021 sebanyak 74.600 jiwa. Dilihat dari perkembangannya, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Parigi Moutong cenderung berfluktuasi dari tahun ke tahun.

Upaya untuk penanggulangan kemiskinan yang ada di Kabupaten Parigi Moutong diperlukan percepatan dan inovasi yang harus dilakukan. Penanggulangan kemiskinan

di Kabupaten Parigi Moutong dilaksanakan melalui beberapa strategi, yaitu:

1. Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat

Strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat diselenggarakan melalui program bantuan sosial, jaminan sosial, subsidi, program stabilitas harga, dan/atau program lainnya yang dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat, di antaranya melalui :

- a. bantuan sosial reguler, seperti Program Keluarga Harapan, Program Sembako, dan Program Indonesia Pintar;
- b. bantuan sosial khusus, seperti Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa), Bantuan Sosial Tunai, Bantuan Sosial Presiden, Top Up bansos reguler, dan Bantuan Beras;
- c. bantuan asistensi rehabilitasi sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), seperti bantuan asistensi rehabilitasi sosial bagi kelompok berkebutuhan khusus (disabilitas dan lanjut usia);
- d. subsidi energi, seperti pemasangan listrik gratis, subsidi listrik dan subsidi elpiji; dan
- e. pemberian Bantuan Iuran Jaminan sosial Kesehatan Nasional (JKN)

2. Peningkatan Pendapatan Masyarakat

Strategi peningkatan pendapatan masyarakat diselenggarakan melalui peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat, di antaranya melalui:

- a) peningkatan Pendapatan/Akses Pekerjaan dan Penyediaan Infrastruktur Dasar, melalui program padat karya dan bantuan individu/kelompok, seperti Program Padat Karya Tunai/PKT (desa dan sektor);
- b) peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, melalui program vokasi dan pelatihan, seperti kartu prakerja, program vokasi;
- c) peningkatan Kapasitas UMKM, melalui peningkatan akses pasar, serta Pendampingan dan Penguatan kewirausahaan, seperti program pendampingan usaha; dan
- d) peningkatan Akses Pembiayaan UMKM, melalui peningkatan akses terhadap lembaga keuangan formal baik bank maupun nonbank, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR);

3. Penurunan Jumlah Kantong-kantong Kemiskinan.

Strategi ini adalah sinergi kebijakan peningkatan produktivitas dan pemberdayaan ekonomi, di antaranya melalui:

- a. pemenuhan pelayanan dasar, seperti peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan, layanan dan infrastruktur kesehatan, dan infrastruktur sanitasi air minum layak; dan
- b. peningkatan konektivitas antarwilayah, seperti pembangunan dan peningkatan sarana transportasi serta pembangunan infrastruktur jalan.

3.2.1.8 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagai indikator pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia merupakan perpaduan antara konsep Indeks Kualitas Lingkungan dan konsep

Environmental Performance Index (EPI). IKLH dapat digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup. Selain itu sebagai bahan informasi dalam proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Indikator kualitas lingkungan yang digunakan untuk menghitung IKLH terdiri dari 3 indikator yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), yang diukur berdasarkan parameter - parameter pH, TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli, dan NO3-N. Indeks Kualitas Udara (IKU) yang diukur berdasarkan parameter SO2 dan NO2, dan indeks tutupan lahan yang diukur berdasarkan luas tutupan hutan.

Indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2022 berada pada angka 74,32 poin yang terdiri dari 3 indikator yaitu Indeks kualitas air sebesar 50,00

poin, Indeks kualitas udara 97,55 poin dan Indeks tutupan lahan sebesar 73,11 poin. Berkaitan dengan poin yang dicapai pada tahun sebelumnya perlu menjadi perhatian Pemerintah Daerah untuk peningkatan poin indeks kualitas lingkungan lebih tinggi dalam hal ini pada indikator kualitas air dan tutupan lahan masih rendah.

Dalam rangka menjawab isu strategi tersebut perlu dirumuskan tema pembangunan Daerah Kabupaten Parigi Moutong tahun 2024. Adapun rancangan tema pembangunan Kabupaten Parigi Moutong 2024 adalah :

**“PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI MELALUI
INOVASI PRODUK UNGGULAN BERBASIS KAWASAN YANG
DIDUKUNG SUMBERDAYA LOKAL”**

Untuk mewujudkan tema pembangunan daerah pada tahun 2024, selanjutnya ditetapkan prioritas pembangunan daerah

Kabupaten Parigi Moutong agar dapat memberi arah pembangunan yang jelas. Selanjutnya agar setiap prioritas pembangunan dapat diimplementasikan lebih terarah, maka prioritas tahun 2024 difokuskan pada ruang lingkup kegiatan sebagaimana tabel 3.3 berikut ini :

Tabel 3.3
Prioritas, Fokus dan Ruang lingkup Kegiatan Pembangunan Tahun 2024

PRIORITAS	FOKUS	KEGIATAN PRIORITAS
1. Reformasi Birokrasi	1. Tata kelola birokrasi yang efektif, efisien, dan akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan SDM Melalui Diklat, Workshop, Sosialisasi; - Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pengawasan. - Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah - Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah - Peningkatan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah. - Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pendapatan Daerah.
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pendidikan - Peningkatan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan - Peningkatan Minat Baca dan Literasi Berbasis Inklusi Sosial - Peningkatan Akases Menuju Fasilitas Pendidikan - Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Kesehatan - Peningkatan Ketersediaan Obat-obatan

Keterkaitan antara Prioritas Nasional, Tahun 2024, Prioritas Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 dan Prioritas Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 3.4
Keterkaitan Agenda Prioritas Pembangunan Nasional,
Dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Parigi Moutong
Tahun 2024

NO.	AGENDA PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2024	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2024
1.	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.	Reformasi Birokrasi.
2.	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.	
3.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing.
4.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
5.	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.	
6.	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.	
7.	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.	Pelestarian lingkungan yang Berkelanjutan.

Tabel 3.5**Keterkaitan Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Parigi Moutong 2024**

No	Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah 2024	Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Parigi Moutong 2024
1	Meningkatkan daya saing produk dan komoditas unggulan daerah yang berdampak pada peningkatan nilai tambah dan pendapatan masyarakat	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif
2	Memperkuat Konektivitas antar wilayah dan infrastruktur dasar untuk mengurangi kesenjangan wilayah	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif
3	Penguatan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing sebagai motor penggerak utama perekonomian daerah	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing
4	Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan	Pelestarian lingkungan yang berkelanjutan
5	Percepatan Reformasi Birokrasi.	Reformasi Birokrasi

BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN OPD

Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang berisikan plafon anggaran sementara masing-masing urusan, satuan kerja dan program/kegiatan/sub kegiatan sebagai tabel berikut (lampiran ..)

BAB V

PENUTUP

Untuk menjamin konsistensi dan sinergitas antara perencanaan pembangunan daerah dengan penganggaran, maka Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menyusun dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024. Selanjutnya dokumen PPAS Kabupaten Parigi Moutong ini dituangkan ke dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Parigi Moutong untuk digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD, yang merupakan bahan penyusunan RAPBD Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2024.

Parigi,

2023

BUPATI PARIGI MOUTONG



SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

**REKAPITULASI PAGU KUA PPAS PEROPD
KABUPATEN PARIGI MOUTONG
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	KODE OPD	URAI OPD	JUMLAH PAGU
			PPAS
1	2	3	9
1	1.01.2.22.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	254,143,991,087.00
2	1.02.0.00.0.00.01.0000	DINAS KESEHATAN	117,724,568,150.00
26	1.02.0.00.0.00.02.0000	BLUD-RSUD ANUNTALOKO	108,054,193,467.00
27	1.02.0.00.0.00.03.0000	RSUD RAJA TOMBOLOTUTU	16,971,429,989.00
28	1.02.0.00.0.00.04.0000	RSUD BULUYE NAPOA"E MOUTONG	7,144,400,879.00
29	1.03.2.10.0.00.01.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM , PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	62,886,850,751.15
30	1.04.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	7,902,908,075.00
31	1.05.0.00.0.00.02.0000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	5,858,240,307.00
32	1.05.0.00.0.00.03.0000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	11,199,993,642.00
33	1.06.0.00.0.00.01.0000	DINAS SOSIAL	7,831,341,797.00
34	2.07.3.32.0.00.01.0000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	4,045,819,554.00
35	2.08.2.14.0.00.01.0000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	11,182,824,861.00
36	2.09.0.00.0.00.01.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN	6,358,280,879.00
37	2.11.0.00.0.00.01.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	7,860,246,075.00
38	2.12.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	6,418,016,253.00
39	2.13.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	10,483,812,394.00
40	2.15.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERHUBUNGAN	9,337,735,656.00
41	2.16.2.21.2.20.01.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	6,614,830,309.00
42	2.17.0.00.0.00.01.0000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	5,565,158,452.00
43	2.18.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	5,021,568,949.00
44	2.23.2.24.0.00.01.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	5,717,499,516.00
45	3.25.0.00.0.00.01.0000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	8,698,735,134.00
46	3.26.2.19.0.00.01.0000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	8,719,274,965.00
47	3.27.0.00.0.00.01.0000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	25,954,866,629.00
48	3.27.0.00.0.00.02.0000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	7,515,327,858.00
49	3.31.3.30.0.00.01.0000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	8,422,709,899.00
50	4.01.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH	52,353,698,550.00
62	4.02.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DPRD	35,873,134,895.00
63	5.01.5.05.0.00.01.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	11,431,985,568.00
64	5.02.0.00.0.00.01.0000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH	345,884,170,825.00
65	5.02.0.00.0.00.02.0000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	12,026,584,144.00
66	5.03.5.04.0.00.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	6,895,341,059.00
67	6.01.0.00.0.00.01.0000	INSPEKTORAT DAERAH	13,094,732,182.00
68	7.01.0.00.0.00.01.0000	KECAMATAN SAUSU	2,294,284,184.00
69	7.01.0.00.0.00.02.0000	KECAMATAN TORUE	1,848,767,949.00

NO	KODE OPD	URAI OPD	JUMLAH PAGU
			PPAS
1	2	3	9
70	7.01.0.00.0.00.03.0000	KECAMATAN PARIGI SELATAN	1,868,564,451.00
71	7.01.0.00.0.00.04.0000	KECAMATAN PARIGI	6,909,757,479.00
77	7.01.0.00.0.00.05.0000	KECAMATAN AMPIBABO	2,095,905,632.00
78	7.01.0.00.0.00.06.0000	KECAMATAN KASIMBAR	2,311,668,286.00
79	7.01.0.00.0.00.07.0000	KECAMATAN TINOMBO SELATAN	2,236,484,117.00
80	7.01.0.00.0.00.08.0000	KECAMATAN TINOMBO	2,067,979,893.00
81	7.01.0.00.0.00.09.0000	KECAMATAN PALASA	1,898,057,777.00
82	7.01.0.00.0.00.10.0000	KECAMATAN MEPANGA	1,974,747,717.00
83	7.01.0.00.0.00.11.0000	KECAMATAN BOLANO LAMBUNU	2,021,696,446.00
84	7.01.0.00.0.00.12.0000	KECAMATAN MOUTONG	2,194,310,268.00
85	7.01.0.00.0.00.13.0000	KECAMATAN TORIBULU	1,512,869,532.00
86	7.01.0.00.0.00.14.0000	KECAMATAN TAOPA	1,763,473,768.00
87	7.01.0.00.0.00.15.0000	KECAMATAN TOMINI	1,618,990,849.00
88	7.01.0.00.0.00.16.0000	KECAMATAN PARIGI BARAT	1,665,457,032.00
89	7.01.0.00.0.00.17.0000	KECAMATAN BALINGGI	1,808,785,553.00
90	7.01.0.00.0.00.18.0000	KECAMATAN SINIU	1,801,825,501.00
91	7.01.0.00.0.00.19.0000	KECAMATAN PARIGI UTARA	1,952,106,704.00
92	7.01.0.00.0.00.20.0000	KECAMATAN PARIGI TENGAH	2,377,801,603.00
93	7.01.0.00.0.00.21.0000	KECAMATAN ONGKA MALINO	1,646,068,959.00
94	7.01.0.00.0.00.22.0000	KECAMATAN BOLANO	1,759,597,949.00
95	7.01.0.00.0.00.23.0000	KECAMATAN SIDOAN	1,573,143,174.00
96	8.01.0.00.0.00.01.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6,046,064,714.00
Total			1,270,442,682,227.15

KEPALA BADAN
PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PARIGI MOUTONG


YUSRIN USMAN, SE, MM
Pembina Tkt I, IV/b
NIP.19700525 200502 1 004

BAB V PENUTUP

Untuk menjamin konsistensi dan sinergitas antara perencanaan pembangunan daerah dengan penganggaran, maka Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menyusun dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024. Selanjutnya dokumen PPAS Kabupaten Parigi Moutong ini dituangkan ke dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Parigi Moutong untuk digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD, yang merupakan bahan penyusunan RAPBD Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2024.

Parigi, 10 Juli 2023

